

DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Oleh:

Harun Nur Jamiel¹, Nurul Anwar², Agus Arifin³, Rini Agustin Eka Yanti⁴, Ilah⁵

^{1, 2, 3} Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

^{4, 5} Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Email koresponden: harun.nj14@gmail.com¹

Sejarah Artikel: Diterima September 2022, Disetujui Oktober 2022, Dipublikasikan November 2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat kontribusi dan pengaruhnya dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap ketimpangan pendapatan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap ketimpangan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel dan analisis asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Ketimpangan Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The study aims to investigate the contributions and effects of local governmental income, general allocation funding, and special allocation funding on income gaps. Drawing on the West Java provincial panel data, the study sought to examine the relationships of the existing variables by means of panel data regression analysis. Results indicated that local governmental incomes gave significantly negative influence to the income gaps, that general allocation funding gave (not significantly) positive influence to the income gaps and that special allocation funding significantly gave negative influence to income gaps.

Keywords: General Allocation Funding, Income Gaps, Local Governmental Incomes, Special Allocation Funding

PENDAHULUAN

Dana perimbangan merupakan faktor penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tatanan pemerintahan daerahnya secara efektif. Karenanya isu otonomi daerah dan pendanaan atas sukses pelaksanaan program-programnya menjadi hal yang menarik. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah mencakup hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan otonomi

daerah memberikan respon yang beragam antar satu daerah dengan lainnya terkait dengan relatifitas atau kemampuan serta sumber dana. Tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama, dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal. Untuk mengatasi persoalan ini, salah satu upayanya, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan yang ditransfer kepada pemerintah daerah.

Dana transfer yang dimaksud merupakan bantuan pemerintah pusat diperuntukan untuk bisa memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan setiap program kerja dan pembangunan daerah. Dana

Alokasi Umum adalah dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan melakukan pemerataan kemampuan dan potensi keuangan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan program desentralisasi. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus adalah dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan dan program khusus sesuai prioritas program nasional.

Selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, pemerintah daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan program-programnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lam dan Sabijono (2015) menjelaskan bahwa: "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah".

Dengan perbedaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima serta Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap daerah, maka akan menimbulkan disparitas atau ketimpangan antar daerah yang ditunjukkan oleh nilai indeks gini.

Tabel 1:
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2016-2019

NO	KAB/KOTA	INDEKS GINI (Persen)			
		2016	2017	2018	2019
1	KAB BOGOR	0,40	0,38	0,42	0,40
2	KAB SUKABUMI	0,33	0,33	0,33	0,35
3	KAB CIANJUR	0,36	0,35	0,37	0,36
4	KAB BANDUNG	0,40	0,39	0,42	0,36
5	KAB GARUT	0,35	0,37	0,37	0,35
6	KAB TASIKMALAYA	0,30	0,32	0,35	0,32
7	KAB CIAMIS	0,33	0,36	0,31	0,35
8	KAB KUNINGAN	0,33	0,32	0,40	0,44
9	KAB CIREBON	0,36	0,36	0,36	0,34
10	KAB MAJALENGKA	0,36	0,35	0,37	0,35
11	KAB SUMEDANG	0,37	0,39	0,42	0,34
12	KAB INDRAMAYU	0,26	0,29	0,32	0,28
13	KAB SUBANG	0,35	0,34	0,33	0,33
14	KAB PURWAKARTA	0,36	0,39	0,40	0,40
15	KAB KARAWANG	0,34	0,35	0,33	0,36
16	KAB BEKASI	0,31	0,34	0,36	0,35
17	KAB BANDUNG BARAT	0,36	0,41	0,39	0,36
18	KOTA BOGOR	0,42	0,41	0,39	0,39
19	KOTA SUKABUMI	0,42	0,40	0,41	0,42
20	KOTA BANDUNG	0,44	0,43	0,42	0,44
21	KOTA CIREBON	0,40	0,41	0,43	0,41
22	KOTA BEKASI	0,39	0,35	0,34	0,35
23	KOTA DEPOK	0,40	0,35	0,37	0,34
24	KOTA CIMAHI	0,42	0,37	0,36	0,44
25	KOTA TASIKMALAYA	0,42	0,42	0,39	0,36
26	KOTA BANJAR	0,37	0,38	0,32	0,30
JUMLAH		9,55	9,56	9,68	9,49
RATA-RATA		0,35	0,36	0,37	0,37
PROVINSI JAWA BARAT		9,55	9,56	9,68	9,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Tahun 2021

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk melihat besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap ketimpangan pendapatan dan pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.

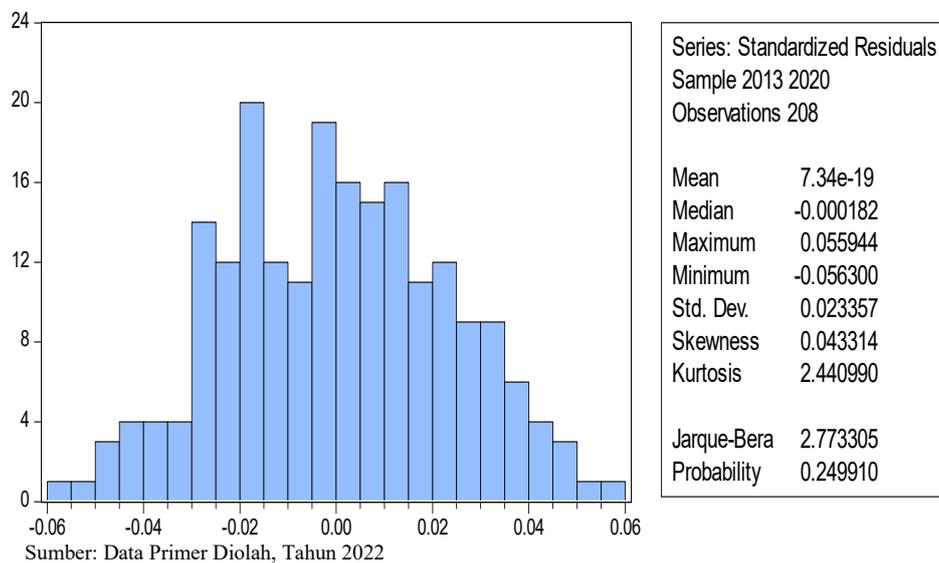
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu gabungan dari data *time series* kurun waktu 8 periode dari 2013 sampai dengan 2020 dan data *cross section* sebanyak 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data sekunder, yaitu laporan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, ketimpangan pendapatan dan pengangguran terbuka. Sumber data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu analisis asumsi klasik, analisis regresi data panel dan hasil *Feasible General Least Square* pada *Fixed Effect Model* dengan perhitungan menggunakan aplikasi Eviews 8.0.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan *Feasible General Least Square* atau *Cross Section Weight* dengan koefisien estimasi *White Cross Section* pada *Fixed Effect Model*, cukup dilakukan pengujian uji normalitas dan uji multikolinearitas, tidak perlu dilakukan pengujian uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.



Gambar 1:
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 1 terlihat *probability (p-value)* sebesar $0,249910 > 0,05$ disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD (X_1)	DAK (X_2)	DAK (X_3)
PAD (X_1)	1,000000	0,427745	0,273109
DAU (X_2)	0,427745	1,000000	0,697967
DAK (X_3)	0,273109	0,697967	1,000000

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2 diketahui semua korelasi antara variabel bebas tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0,8, artinya pada model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi antara variabel bebas.

Dalam penelitian ini menggunakan *Feasible General Least Square* dengan koefisien estimasi *White Cross Section* pada *Fixed Effect Model*

Tabel 3
Hasil Analisis *White Cross Section*

Variabel	Koefisien	Std Error	t-statistik	Prob.
Konstanta	0,384163	0,034836	11,02788	0,0000
PAD (X_1)	-2,06E-14	5,46E-15	-3,776430	0,0002
DAU (X_2)	-1,87E-14	3,04E-14	-0,616735	0,5382
DAK (X_3)	5,38E-14	2,52E-14	2,131638	0,0344

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3, maka persamaan regresi *Feasible General Least Square* dengan koefisien estimasi *White Cross Section* adalah $Y = 0,384163 - 2,060623 (X_1) - 1,873509 (X_2) + 5,375911 (X_3)$.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam menerangkan variasi perubahan indeks gini dilakukan penghitungan koefisien determinasi. Hasil analisis regresi dapat diketahui nilai koefisien determinasi (*Ajd R2 Square*) sebesar 0,7650 yang berarti bahwa sebesar 76,50 persen variasi perubahan naik turunnya indeks gini dapat dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan sisanya 23,50 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Untuk mengetahui tingkat kelayakan model dalam menerangkan hubungan kasual antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dengan indeks gini dilakukan uji signifikansi bersama-sama (uji F). Hasil uji signifikansi bersama-sama (uji F) dalam penelitian ini diperoleh F_{hitung} atau $F_{statistik}$ sebesar 25,07837 dengan *p-value* atau $F_{statistik}$ sebesar $0,000000 < 0,05$, maka Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel indeks gini.

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap indeks gini secara parsial digunakan uji koefisien regresi (uji t). Berikut ini uraian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam pengujian hipotesis secara individu atau parsial berdasarkan tabel 2.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (X_1) diketahui *p-value* sebesar $0,0002 < 0,05$, maka Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks gini.
- 2) Dana Alokasi Umum (X_2) diketahui *p-value* sebesar $0,5382 > 0,05$, maka Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks gini.

- 3) Dana Alokasi Khusus (X_3) diketahui *p-value* sebesar $0,0344 < 0,05$, maka Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks gini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan pendapatan

Hasil pengujian dari hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Hasil pengujian sesuai dengan hipotesis pertama bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Hasil pengujian sejalan dengan Wardhana *et al* (2013) dan Putri & Natha (2014) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian dari hipotesis kedua menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Hasil pengujian tidak sesuai dengan hipotesis kedua bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Hasil pengujian tidak sejalan dengan Wardhana *et al* (2013) dan Sidik *et al* (2020) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Namun hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putri & Natha (2014) dimana hasil penelitian menunjukkan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian dari hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Hasil pengujian sesuai dengan hipotesis ketiga bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Hasil pengujian sejalan dengan Wardhana *et al* (2013) dan Sidik *et al* (2020) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan penelitian Ridho & Wijayanti (2022) menunjukkan hasil jumlah dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2020, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2020 dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2020.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya memasukan tiga variabel *independent*, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memasukan variabel *dependent* atau variabel *independent* lebih banyak lagi agar diperoleh hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan harapan. Selain itu, dapat mengganti atau menambahkan obyek penelitian yang sudah ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lam, N & Sabijono, H. (2015). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Beserta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.2 Juni 2015, Hal. 428-437. Diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbi/article/view/13591>
- Putri dan Natha. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *E-Jurnal EP*

Unud. 4(1). 41-49. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/44519-ID-pengaruh-pendapatan-asli-daerah-dana-alokasi-umum-dan-belanja-modal-terhadap-ket.pdf>

- Ridho, M., A., M & Wijayanti, D. (2022). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, Volume 1 Issue 1, 2022: 71-81. Diakses dari: <https://journal.uui.ac.id/JKEK/article/view/25174>
- Sidik *et al*. (2020). Dampak Alokasi Dana Perimbangan (Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) Terhadap Tingkat Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 15(2). 229-238. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/10325>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
- Wardhana *et al*. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Journal of Social Sciences and Humanities*. 15(2). 111-118. Diakses dari: <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5737>

